



ANGKA 'WHISTLE BLOWER' MASIH NIHIL PNS Jangan Takut Lapor Dugaan Pelanggaran

YOGYA (KR) - Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai lain di lingkungan Pemkot Yogyakarta diminta tak ragu melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang diketahuinya. Sejak Desember 2014, Inspektorat Kota Yogyakarta sudah membuka layanan pengaduan khusus bagi *whistle blower*, namun angka partisipasinya masih nihil.

Inspektur Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat, Kamis (6/8), mengungkapkan layanan *whistle blower* sengaja dibuka untuk mengawasi kinerja aparatur pemerintah dari segi penggunaan anggaran. "Kami juga tidak tahu mengapa belum ada yang mengakses layanan itu. Bisa jadi karena risiko bagi pelapor cukup besar," jelasnya.

Diakui, bagi PNS yang hendak membuka tabir dugaan pelanggaran yang dilakukan sesama rekannya, bukan perkara mudah. Apalagi jika terjadi laporan balik yang bisa mengancam karir dan keselamatan jiwanya. Sehingga membutuhkan tekad dan keberanian yang kuat.

Meski demikian, imbuhan Wahyu, Inspektorat tetap menjamin kerahasiaan si pelapor. Mulai merahasiakan nama pelapor, instansi unit kerjanya hingga delik laporan. Namun, setiap la-

poran harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Hal ini supaya laporan dapat ditindak lanjuti serta tidak mengarah pada upaya fitnah. "Setiap pelapor itu pasti kami jamin kerahasiaannya. Jadi, sebenarnya tidak perlu takut untuk melapor," imbuhnya.

Selain itu, Inspektorat juga sudah menyiapkan layanan baru guna menjamin kebijakan dari kepala instansi maupun pejabat pembuat komitmen. Terutama kebijakan yang menyebabkan kelebihan bayar padahal tidak ada upaya atau niat untuk melakukan tindakan korupsi. Ditargetkan, bulan depan layanan tersebut sudah bisa diaplikasikan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Augusnur mengungkapkan, pihaknya akan turut memberikan dukungan bagi Inspektorat guna menutup celah setiap upaya pelanggaran. Mulai dari kebutuhan anggaran hingga jaminan perlindungan hukum bagi PNS yang mau menjadi *whistle blower*. "Kalau dari sisi anggaran, sepertinya tidak ada persoalan. Kami akan menyetujui selama implikasinya baik bagi jalannya pemerintahan. Tapi hal di luar itu seperti jaminan hukum bagi pelapor yang seharusnya diperhatikan," ujarnya. (Dhi)-a

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Inspektorat | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005